

KETAHAHANAN DAN KERENTANAN USAHA KECIL: DI ANTARA BENCANA ALAM, KEBIJAKAN EKONOMI, DAN LINGKUNGAN SOSIAL

Konsep kerentanan usaha mengacu pada dua keadaan, yaitu ada tidaknya sumber daya dan mekanisme yang memadai untuk menghindari sejumlah risiko atau guncangan yang mungkin dihadapi suatu usaha dan derajat kualitas sumber daya yang dimiliki suatu usaha untuk secara efektif mampu menghadapi risiko atau guncangan yang menimpa. Usaha dikatakan rentan bila secara internal dan eksternal tidak mempunyai sumber daya dan mekanisme yang memadai untuk menghadapi risiko atau guncangan. Dalam setiap kegiatan ekonomi selalu terkandung risiko yang tingkatannya berkaitan dengan banyak hal. Begitu pula guncangan. Bedanya, risiko mengandaikan adanya pemahaman akan arena yang dimasuki dan kesadaran akan pilihan; sedangkan guncangan lebih bersifat tiba-tiba. Dalam kerangka memahami kerentanan usaha kecil perlu kiranya mem-

bagi sumber risiko dan guncangan ke dalam sumber sosial-ekonomi dan sumber lingkungan. Sumber-sumber sosial-ekonomi guncangan misalnya adalah krisis ekonomi, perubahan kebijakan, dan kelangkaan sumber daya. Sumber lingkungan misalnya adalah bencana alam. Setiap guncangan bisa menghancurkan atau, paling tidak, mengurangi kemampuan suatu usaha untuk bertahan hidup. Sebagai kasus misalnya dalam artikel **Dani Hamdan** dalam artikel berjudul "Kondisi Usaha Kecil dan Mikro di Daerah Bencana" tentang industri kecil gerabah di Kecamatan Pundong, Bantul, DI Yogyakarta. Dari hasil telusuran di lapangan, Dani Hamdan menemukan bahwa gempa bumi yang terjadi tidak hanya menghancurkan tempat usaha secara fisik, tapi juga mengganggu jalur asupan dan pemasaran. Ketergantungan industri kecil pada bahan baku dan sumber daya manusia se-

tempat menyulitkan pengusaha kecil membangun kembali usahanya tanpa adanya bantuan dari pihak luar. Gempa bumi telah menyulitkan para pengusaha kecil memperoleh kembali bahan baku dan pekerja yang nyatanya sama-sama sebagai korban bencana. Selain itu, karena kegiatan usaha sebagian dilakukan di dalam rumah tinggal, maka gempa tidak hanya menghancurkan tempat tinggal, tapi juga tempat usaha. Boleh dikatakan bahwa pengusaha kecil korban bencana alam mengalami keadaan seperti dalam pepatah 'setelah jatuh, tertimpa tangga pula'.

Masih berkaitan dengan bencana alam, tulisan **Yuni Pristiwati** berjudul "Pemulihan Usaha Kecil-Mikro dan Penguatan Perempuan di Daerah Bencana" menekankan dampak bencana alam terhadap kondisi perempuan pengusaha kecil-mikro. Beban ganda yang ditanggung perempuan karena peran gendernya dalam masyarakat begitu tampak ketika bencana menimpa. Bencana alam tidak hanya menimbulkan kesulitan terhadap perempuan sebagai korban, tetapi juga menambah beban yang selama ini sudah ditanggung perempuan. Bencana merupakan satu faktor penting dalam derajat kerentanan perempuan usaha kecil. Tetapi Yuni Pristiwati meyakini bahwa perempuan, baik sebagai

pengusaha kecil maupun sebagai anggota rumah tangga, merupakan sosok yang paling tangguh menghadapi dan membangkitkan kembali usaha kecilnya. Oleh karena itu, perlu adanya program-program khusus yang ditujukan pada pemulihan kembali usaha-usaha kecil yang dikelola perempuan.

Artikel **Dede Mulyanto** berjudul "Kerangka Sosiologis Memahami Dampak Bencana Alam terhadap Usaha Kecil" menyoroti beberapa variabel penting dalam analisis sosial dampak bencana. Pertama, bencana dikaitkan dengan derajat kerentanan atau ketahanan usaha. Dalam kerangka konsep kerentanan, bencana alam berada di sisi guncangan (*shock*) yang dampaknya terkait langsung dengan kemampuan usaha dan pelaku usaha menghadapinya. Kemampuan ini berkaitan dengan ada tidaknya cadangan modal usaha baik berupa keuangan maupun jaringan sosial. Pelaku usaha kecil adalah juga anggota suatu kolektif. Bencana alam, berbeda dengan sumber-sumber guncangan usaha lainnya, menimpa pelaku usaha bukan hanya sebagai usahawan semata, melainkan juga sebagai anggota rumah tangga, anggota kelompok kekerabatan, dan warga pertetanggaan. Oleh karena itu, kajian dampak bencana perlu juga memperhatikan arena

sosial-budaya tempat pelaku usaha berada.

Bila Dani Hamdan dan Yuni Pristiwati membahas dampak bencana alam terhadap kondisi usaha kecil di tempat bencana, maka **Deni Mukbar** lewat artikel berjudul "Denyut Usaha Kecil di Pasar Tradisional dalam Himpitan Hipermarket" menyoroti 'bencana ekonomi' yang harus dihadapi usaha-usaha kecil, yaitu pertumbuhan luar biasa pasar-pasar eceran modern seperti supermarket atau hipermarket di antara pasar-pasar tradisional. Pasar tradisional merupakan tempat para pedagang eceran menjalankan usahanya. Konon, menjamurnya pasar-pasar eceran modern yang menjangkau hingga permukiman penduduk telah menjadi pesaing yang bisa mematikan kegiatan usaha pedagang-pedagang eceran kecil. Oleh karena itu, mekanisme pangaturan dipandang menjadi satu hal yang diperlukan untuk menjaga keselarasan dan sehatnya persaingan antarusaha eceran, terutama antara hipermarket dan pedagang kecil di pasar-pasar tradisional.

Artikel Deni Mukbar menjadi mudah dipahami bila disambung dengan ulasan oleh **Muhammad Kholikul Alim** atas buku karya El Fisgon berjudul *Menghadapi Globalisasi: Kiat Gombal*

buat Pengusaha Kecil terbitan Marjin Kiri, 2006. Dalam ulasan tersebut tergambar bahwa di dalam formasi sosial kapitalisme global, usaha-usaha kecil hanya pernak-pernik yang rentan untuk jatuh dihantam kekuatan pemodal besar yang memasuki pasar produknya. Kebertahanan usaha kecil hanya memungkinkan ketika produk mereka hanya menjadi bagian dari pemenuhan kebutuhan kelas pekerja. Dengan kata lain, tetap hidupnya usaha-usaha kecil bukan karena derajat ketahanan usaha kecil yang baik, tetapi karena dibutuhkan sistem kapitalis untuk memelihara dan membentuk ulang sejumlah tertentu kelebihan tenaga kerja dalam barisan kelas pekerja yang memungkinkan kapital besar menghisapnya.

Derajat kerentanan usaha kecil, menurut artikel **Thee Kian Wie** berjudul "Kebijakan Ekonomi dan Ketahanan Usaha Kecil-Menengah di Indonesia", juga harus dilihat dari aspek kebijakan pemerintah. Menurut Thee, kebijakan yang berorientasi pada 'kesejahteraan' akan melenakan usaha kecil sehingga usaha-usaha kecil tidak akan mampu bersaing dengan baik pada saat pintu persaingan dibuka atau ketika usaha tersebut harus memasuki pasar ekspor yang tingkat risiko dan guncangannya besar, misalnya. Thee melihat adanya kebutuhan

untuk mengubah orientasi kebijakan-kebijakan terhadap usaha kecil dari sekadar menjadi bagian dari upaya 'pengentasan kemiskinan' menjadi kebijakan yang memungkinkan penguatan ketahanan usaha kecil menghadapi risiko dalam arena-arena atau kondisi baru. Sudah saatnya kebijakan terhadap usaha kecil tidak untuk melindungi usaha kecil dari persaingan tetapi melembagakan persaingan. Selain untuk menutup kemungkinan munculnya monopoli di tangan segelintir pelaku usaha tertentu dan diskriminasi bagi pelaku usaha lain yang tidak mempunyai hubungan kolusif dengan pelaksana kebijakan, melembagakan persaingan itu berguna juga untuk meningkatkan daya tahan usaha menghadapi persaingan.

Satu sejarah perkembangan kondisi usaha kecil di Vietnam dijabarkan **Nurul Widyaningrum**. Dalam esai berjudul "Melihat ke Negeri Tetangga: Usaha Kecil di Vietnam", Widyaningrum menggambarkan jatuh bangunnya kedudukan usaha kecil dalam sejarah ekonomi Vietnam sebelum dan setelah revolusi komunis menguasai seluruh Vietnam. Bahkan, pembahasan juga diarahkan pada perkembangan kondisi kontemporer usaha-usaha kecil. Pada intinya, Widyaningrum hendak mengajak kita mengambil hikmah dari kasus Vietnam yang menunjuk-

kan peran penting usaha kecil-mikro dalam sistem ekonomi yang mengalami transisi dari sistem ekonomi terpusat ke sistem ekonomi pasar. Meskipun terdapat perdebatan tentang peran *Doi Moi* di dalam pertumbuhan sektor swasta ini (yaitu, apakah *Doi Moi* mendorong tumbuhnya usaha-usaha kecil atau sebaliknya), *Doi Moi* merupakan titik balik pengakuan pemerintah Vietnam akan adanya usaha-usaha pribadi yang beroperasi secara informal. Sektor informal di Vietnam menjadi akar tumbuhnya usaha-usaha kecil dan menengah di Vietnam dan berperan penting di dalam mendorong ekonomi Vietnam. Meskipun demikian, pengamatan yang lebih dalam terhadap kondisi usaha kecil menunjukkan masih adanya kendala dan hambatan yang dialami usaha kecil. Di samping kendala-kendala 'klasik' seperti akses terhadap sumber modal, hambatan juga muncul dari pendekatan pemerintah Vietnam terhadap usaha kecil. Dalam sistem ekonomi sosialis yang terpusat, usaha milik negara memonopoli kegiatan ekonomi, dan dengan demikian menghambat tumbuhnya sektor usaha kecil. Dalam sistem ekonomi pasar yang diterapkan sekarang, pemerintah Vietnam dinilai lebih memberikan kemudahan terhadap pengusaha asing dibandingkan dengan pengusaha lokal.

Jauh dari riuh-rendahnya pembahasan skala makro, dalam "laporan dari lapangan" berjudul "Jaringan Usaha Kecil dan Ketahanan Ekonomi Rumah Tangga", **Dian Widyaningsih** lebih melihat langsung dari lapangan bahwa faktor jaringan sosial yang dimiliki pelaku usaha kecil sebagai unsur penting dalam ketahanan usaha. Dengan masuknya pelaku-pelaku usaha kecil dalam sebuah jaringan yang terorganisasi, maka beberapa persoalan yang biasanya menjadi masalah klasik usaha kecil-mikro, seperti kesulitan pendanaan yang berujung pada ketergantungan terhadap rentenir sebagai sumber dana tunai, bisa dihi-

langkan. Kelompok pelaku usaha terorganisasi juga merupakan wahana pengembangan keterampilan dan informasi usaha. Pada titik puncaknya, kelompok ini bisa menjadi alat perjuangan kebijakan di tingkat daerah yang memungkinkan masuknya pengaruh dalam pembuatan kebijakan yang memihak usaha-usaha kecil. Artinya, organisasi sebagai simpul jaringan sosial pengusaha merupakan faktor penting dalam membangun ketahanan usaha menghadapi guncangan.

[Redaksi]



